

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2019. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang berkompeten didalam pelaksanaan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil berupaya terus menerus untuk dapat menjadi lembaga yang amanah, professional, dan akuntabel di dalam pengelolaan manajemen SDM Aparatur agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terukur, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu didalam penyusunan rencana kerja yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian, peningkatan kualitas pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur, peningkatan kualitas penataan Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kualitas pengadaan atau rekrutmen pegawai, peningkatan kualitas informasi manajemen kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui program dan kegiatan yang terencana, mantap, dan terintegrasi sesuai dengan tuntutan masyarakat yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 didasarkan kepada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2019 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal

RKPD) Tahun 2016, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 1 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
13. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga2 Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
18. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja-SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2016.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab di bidang pengelolaan Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2016 mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Tahun 2014 – 2019

. BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan ebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sangat menyadari pentingnya pembangunan di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Dengan pemikiran tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi secara terus menerus pelaksanaan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas kegiatan tahun 2015.

Evaluasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian, peningkatan kualitas SDM Aparatur, peningkatan kualitas penataan SDM Aparatur, peningkatan kualitas pengadaan pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai, secara menyeluruh dan berkesinambungan, memperbaiki sistem dan pengkajian peraturan perundangan-undangan di bidang Kepegawaian.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015

Pada Tahun 2015 total anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 23.472.818.420,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 7 program dan 15 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 21.788.919.648,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94%. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah
dan Pencapaian RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah s/d Tahun 2015**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2015	
				Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
120.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	IKM Aparatur terhadap pelayanan adm. Perkantoran, dan kenyamanan kantor (IKM Pelayanan Internal)	100%	100%	100%
120.01.019	a. Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	a. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP b. Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP			
120.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%
120.02.012	a Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	a. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor b. Jumlah penerbitan buletin			
120.02.031	b Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana			
120.08	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu dan benar sesuai dengan renstra.	100%	100%	100%
120.08.001	a Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu (RKA,DPA,Renstra,PK)			
120.08.002	b Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan (LKjIP, LPPD,LKPJ dan Evaluasi Laporan)			
120.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Porsentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	100%	100%
120.07.002	a Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu			
120.07.001	b Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian			
120.41	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif,transparan dan akuntabel			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2015	
				Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
120.41.019	a Kegiatan meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1. Analisis kompetensi manajerial aparatur 2. Analisis kebutuhan pengembangan SDA 3. Analisis kebutuhan aparatur yang menduduki JfT 4. Development center bagi Eselon III 5. Pembekalan jiwa entrepreneurship bagi PNS 6. Grand design manaemen ASN di lingkungan Pemprov. Jatim 7. Pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur 8. Sertifikasi aparatur dibidang TIK	70%	65%	92,8%
120.41.084	b Perencanaan kepegawaian dan formasi	1. Sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana 2. Workshop penyusunan beezeting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi 3. Analisis kebutuhan aparatur jabatan fungsional umum			
120.41.085	c Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	1. Penggandaan peraturan kepegawaian 2. Penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan 3. Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai 4. Verifikasi LP2P 5. Bintek LP2P 6. Konsultasi pelanggaran kepegawaian 7. Sidak Disiplin Pegawai 8. Aplikasi E- Presensi	80%	84,16%	105,2%
120.97	Program Pengembangan Data Informasi	Prosentase database kepegawaian yang berkualitas (akurat, lengkap, up date, akuntabel)			
120.97.007	a Kegiatan penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	1. Tersedianya aplikasi sistem informasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan 2. Tersedianya file tata naskah pegawai yang akurat	50%	78%	156%
120.94	Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur	Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan			
120.94.002	a Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	1. Persentase pelaksanaan pelantikan dan sertijab 2. Persentase penyelesaian pensiun pegawai ASN 3. Persentase penyelesaian proses kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur 4. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 5. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi Tim Baperjakat	100%	96,2%	96,2%
120.94.004	b Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Prosentase penetapan pejabat untuk mengisi jabatan yang kosong	75%	75%	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2015)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2015	
				Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
120.94.005	c Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir	1. Penyusunan Pergub ttg standar kompetensi jabatan 2. Pendampingan dan fasilitasi penyusunan standart kompetensi jabatan eselon II 3. Penyusunan standar kompetensi pimpinan tinggi pratama di lingkungan SKPD 4. Penyusunan Pergub ttg pola karir	1. 75%	1. 75%	1. 100%
			2. 75%	2. 60%	2. 80%
120.94.006	d Peningkatan kesejahteraan aparatur ,penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	1. Bimtek penyusunan SKP 2. Bimtek pengusulan satyalencana karya satya berbasis WEB 3. Pembekalan Kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas 4. Pengusulan satyalencana karya satya bagi ASN 5. Evalausi penilaian kinerja 6. Aplikasi e-SKP 7. Penganugrahan satyalencana karya satya bagi ASN Jawa Timur	75%	85%	113,3%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Untuk analisis kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kenerja yang ada dan pada tahun 2015 kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi. Evaluasi program prioritas tahun anggaran 2015 Badan Kepgawaian Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan target indikator prosentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel artinya BKD Jawa Timur dalam memberikan suatu penghargaan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pagu program ini dianggarkan Rp. 3.886.653.500,00 terealisasi Rp. 3.592.442.785 atau 92,43%. Program ini didukung 3 kegiatan yaitu:

1.1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dalam pelaksanaan dan tanggungjawabnya,

1. Pagu Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.200.000.000,00 terealisasi Rp. 2.034.035.120,00 atau capaian kinerja keuangan 92,46% dengan didukung 9 (Sembilan) indikator kinerja output yaitu :

1. Prosentase PNS yang lulus ujian dinas dan penyesuaian ijasah dengan target 100% tercapai 100%.
2. Jumlah pelaksanaan ujian gol III ke IV/a dengan target dengan target 1 kali pelaksanaannya tercapai 1 kali pelaksanaan.
3. Analisis kompetensi manajerial aparatur dengan target 1 dokumen tercapai 1 Dokumen.
4. Analisis kebutuhan pengembangan SDM Aparatur dengan target 1 Dokumen tercapai 1 dokumen.
5. Analisis kebutuhan pengembangan SDM Aparatur dengan target 1 Dokumen tercapai 1 dokumen.
6. Development center bagi eselon III dengan target 1 Dokumen tercapai 1 dokumen.
7. Grand design manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan target 1 Dokumen tercapai 1 dokumen.
8. Pembentukan assesor penilaian kompetensi teknis aparatur dengan target 1 Dokumen tercapai 1 Dokumen.
9. Sertifikasi aparatur di bidang TIK (teknologi Informatika dan Komunikasi) dengan target 52 PNS tercapai 0 (belum tercapai)

2. Permasalahan

- a. Masih belum adanya standart kelulusan dalam pelaksanaan ujian dinas/ujian penyesuaian, sehingga ujian hanya sebatas legalitas dari pelaksanaan ketentuan yang ada.
- b. Belum adanya perencanaan yang ideal akan kebutuhan JFU (jabatan pelaksana) maupun JFT.
- c. Kurangnya kewenangan di dalam pengembangan atau *development center* bagi eselon III.
- d. Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum ada badan sertifikasi di bidang TIK, sehingga untuk menjadikan PNS yang memiliki kompetensi di bidang TIK dan bersertifikasi masih belum optimal. Hal ini sesuai dengan UU No 5 tahun 2004 dan UU

No. 23 tahun 2014 ada 4 (empat) kompetensi yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan.

3. Solusi

- a. Pada penentuan evaluasi kelulusan peserta (pegawai), khususnya pegawai yang selanjutnya mempunyai pangkat dan golongan tinggi (III/d ke atas) dan mempunyai peluang pola karier untuk menduduki jabatan struktural, perlu dibuatkan aturan/pedoman penilaian prestasi bagi pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu yang objektif dan transparan, menyusun standart kelulusan.
- b. Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai yang ideal, baik itu kebutuhan JFU (jabatan pelaksana) maupun JFT selama 5 tahun ke depan.
- c. Memperkuat peranan BKD Provinsi Jawa Timur di dalam pengembangan atau *development center* bagi eselon III, bahkan diperlukan UPT khusus uji kompetensi bagi pegawai yang akan menduduki eselon tertentu.
- d. Dalam rangka menjadikan PNS atau ASN sebagai profesi, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk semacam badan sertifikasi pegawai terutama diperuntukan PNS yang ada di Jawa Timur di segala bidang. Hal ini sesuai dengan UU No 5 tahun 2004 dan UU No 23 tahun 2014 ada 4 (empat) kompetensi yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan.

1.2 Perencanaan kepegawaian dan formasi,

1. Pagu Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 656.189.000,00 terealisasi Rp. 596.712.620,00 atau capaian kinerja keuangan 90,94%, dengan didukung 3 indikator output yaitu :

1. Jumlah dokumen pemetaan pegawai berbasis jabatan dengan target 1 Dokumen tercapai 1 dokumen.
2. Workshop penyusunan bezzeting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi dengan target 1 Kali pelaksanaan tercapai 1 kali pelaksanaan.
3. Sosialisasi pergub tentang jabatan fungsional pelaksana dengan target 1 Kali pelaksanaan tercapai 1 kali pelaksanaan.

2. Permasalahan

- a. Belum ada perencanaan pegawai berbasis jabatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Belum sinkron kebutuhan pegawai (bezzeting pegawai) setiap SKPD dengan perencanaan yang dilakukan oleh BKD Provinsi Jawa Timur.

c. Belum adanya kekuatan hukum/produk hukum yang mendukung perencanaan kebutuhan pegawai.

3. Solusi

a. Perlunya adanya perencanaan kebutuhan pegawai berbasis jabatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

b. Mensinkronkan kebutuhan pegawai (bezzeting pegawai) setiap SKPD dengan perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan oleh BKD Provinsi Jawa Timur dan ditetapkan sebagai peraturan/pedoman.

c. Perlunya kekuatan hukum/produk hukum yang tinggi (setingkat perda) untuk mendukung perencanaan kebutuhan pegawai di Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun di Pemerintahan Kabupaten/kota se-Jawa Timur, baik itu struktur organisasi, nomenklatur jabatan, sehingga akan mempermudah koordinasi.

1.3 Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan,

1. Pagu Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 1.030.464.500,00 terealisasi Rp. 961.695.045,00 atau capaian kinerja keuangan 93,33%, dengan didukung indikator output yaitu :

1. Prosentase tingkat kehadiran pegawai ASN dengan target 80 % tercapai 84,16%.
2. Jumlah laporan konsultasi pelanggaran kepegawaian dengan target 1 Dokumen tercapai 1 dokumen.
3. Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peraturan kepegawaian dengan target 1 kali pelaksanaan tercapai 1 kali pelaksanaan.
4. Prosentase pegawai yang melaporkan LP2P dengan target 100 % tercapai 100%.
5. Jumlah Bimtek LP2P dengan target 1 kali pelaksanaan tercapai 1 kali pelaksanaan.
6. Jumlah sidak disiplin pegawai dengan target 4 kali pelaksanaan tercapai 4 kali pelaksanaan.

2. Permasalahan

a. Lemahnya penegakan disiplin pegawai, yakni sanksi bagi pegawai yang belum melaporkan harta kekayaan, LP2P, maupun datang terlambat.

b. Lemahnya audit internal, baik itu menyangkut permasalahan kepegawaian atau audit kepegawaian (non keuangan) maupun permasalahan keuangan.

- c. Minimnya dana atau anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNS yang akan purna tugas agar meningkat harapan hidup PNS yang akan purna tugas tersebut.

3. Solusi

- a. Penegakan hukuman atau sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin pegawai, baik dari hal yang kecil seperti terlambat masuk kerja, tidak melaporkan harta kekayaan bagi pejabat eselon III ke atas, melaporkan LP2P dengan benar, sampai dengan hal-hal pelanggaran yang berat.
- b. Memperkuat peran audit internal disetiap SKPD, bahkan seharusnya setiap SKPD harusnya dibentuk tim audit internal untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, terutama menyangkut permasalahan kepegawaian atau audit kepegawaian (non keuangan) maupun permasalahan keuangan.
- c. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Bappeda mendukung dalam hal penyediaan dana yang cukup untuk memberikan penghargaan bagi PNS yang akan purna tugas melalui pembekalan kewirausahaan bagi PNS yang akan purna tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. **Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur**

Program penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur, dengan indikator kinerja prosentase penataan SDM Aparatur sesuai formasi dan kebutuhan, capaian kerjanya adalah 70%, artinya didalam proses memenuhi kebutuhan pegawai yang sesuai kebutuhan dan kompetensinya masih belum tercapai, baik dari pengadaan pegawai (CPNS), hasil dari analisis pegawai yang masuk atau mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun dengan memperdayagunakan pegawai PTT, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih kekurangan pegawai. Program ini dianggarkan Rp. 6.858.628.880,00 terealisasi Rp.3.324.641,508,00 atau capaian kinerja keuangan 48,47%, artinya program ini masih belum seluruhnya tercapai, apa yang direncanakan belum terlaksana sesuai dengan harapan. Program ini didukung 5 (lima) kegiatan yaitu:

2.1 Seleksi rekrutmen pegawai yang transparan dan bebas KKN melalui sistem CAT,

1. Pagu Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 1.256.197.000,00 terealisasi Rp. 821.538.234,00 atau capaian kinerja keuangan 65,40%, dengan didukung 6 (enam) indikator output yaitu

1. Prosentase CPNS sesuai dg kebutuhan dan kompetensinya dengan target 100 % tercapai 0%.
2. IKM proses rekrutmen CPNS dengan target nilai 83 Skor (baik) tercapai 0.
3. Jumlah seleksi administrasi pendaftaran data pelamar umum P3K sistem LJK dengan target 1 kali pelaksanaan tercapai 0.
4. Jumlah pelaksanaan penyusunan naskah soal TKB dengan target 1 kali pelaksanaan tercapai 0.
5. Jumlah pelaksanaan seleksi ujian ASN umum sistem CAT dengan target 1 kali pelaksanaan tercapai 0
6. Jumlah pelaksanaan fasilitasi ujian TKD penerimaan calon praja IPDN dengan target 4 kali tercapai 4 kali.

2. Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi yaitu tidak disetujui usulan formasi pegawai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ada instruksi dari Pemerintah melalui surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/2163/M.PAN-RB/06/2015, tentang penundaan penambahan pegawai ASN 2015, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ***tidak melakukan Rekrutmen CPNS***,

3. Solusi

BKD telah mengusulkan formasi khusus untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, umum dan gigi, memfasilitasi IPDN Jawa Timur yang lulus untuk magang di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengevaluasi dan menganalisa serta memperdayagunakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau pada Rumah sakit umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, demikian juga untuk seleksi IPDN diambil oleh pemerintah pusat. Penundaan pelaksanaan rekrutmen pegawai atau moratorium tersebut mempengaruhi capaian kinerja maupun capaian kinerja keuangan, sehingga anggaran maupun kinerja pada kegiatan ini tidak tercapai atau (0%).

2.2 Penataan Pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya,

1. Pagu Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 3.281.664.100,00 terealisasi Rp. 3.049.572.606 atau capaian kinerja keuangan 92,93%, artinya bahwa rencana target kinerja tercapai sesuai dengan harapan. Kegiatan ini didukung 7 (tujuh) indicator kinerja output yaitu :

1. Jumlah pegawai yang didistribusikan sesuai dengan hasil pemetaan dengan target 1.000 PNS tercapai 926 PNS.
 2. Jumlah rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat dengan target 550 Rekomendasi tercapai 538 Rekomendasi.
 3. Prosentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi dengan target 100% tercapai 96,2%.
 4. Jumlah pelantikan dan sertijab dengan target 14 kali pelaksanaan tercapai 14 kali pelaksanaan.
 5. Jumlah penyelesaian proses pensiun ASN dengan target 1.850 SK tercapai 1.847 SK.
 6. Jumlah penyelesaian proses kenaikan pangkat ASN dengan target 14.970 SK tercapai 14.962 SK.
 7. Jumlah pengangkatan jabatan fungsional tertentu (JFT) dengan target 200 Pegawai (JFT) tercapai 198 pegawai (JFT)
2. Permasalahan
- a. Belum adanya standar kompetensi (manajerial, teknis, sosio kultural, dan pemerintahan) dalam proses penataan dan pendistribusian pegawai.
 - b. Pelaksanaan penataan dan pendistribusian pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan di masing-masing SKPD.
 - c. Belum semua PNS ditetapkan dalam jabatan fungsional umum yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Timur atau pejabat yang berwenang;
3. Solusi
- a. Perlunya adanya pedoman dan standar kompetensi (manajerial, teknis, sosio kultural, dan pemerintahan) di dalam proses penataan dan pendistribusian pegawai, terutama bagi pegawai yang akan mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Pelaksanaan penataan pegawai, khususnya dalam pendistribusian pegawai harus berpedoman pada rencana kebutuhan pegawai, baik sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pegawai.
 - c. Segera semua PNS di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ditetapkan dalam jabatan fungsional umum yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Timur atau pejabat yang berwenang sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya;

2.3 Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka

1. Pagu Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 389.519.900,00 terealisasi Rp. 232.512.118,00 atau capaian kinerja keuangan 59,69% yang didukung 2 (dua) indikator. Indikator kinerja output yaitu :

1. Prosentase penempatan pejabat struktural sesuai dengan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan target 75% tercapai 75%,
2. Jumlah pengisian lowongan jabatan terbuka dengan target 5 kali pelaksanaan tercapai 5 kali pelaksanaan.

2. Permasalahan

- a. Minimnya pendaftar karena kendala mental individu yang kurang percaya diri dan adanya anggapan kurang kredibel.
- b. Belum adanya standar penilaian yang objektif didalam menentukan dan menetapkan pegawai di dalam jabatan.
- c. Belum adanya standar kompetensi pegawai setelah Undang-Undang ASN diberlakukan.
- d. Belum adanya standar hasil atau output kinerja dari suatu jabatan.

3. Solusi

- a. Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka seharusnya diumumkan secara luas, tidak hanya di kalangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan tetapi juga Pemerintah Kabupaten/Kota-se Jawa Timur, serta mempermudah syarat dan prasaratan dan diumumkan secara objektif dan transparan.
- b. Disusun pedoman/standar penilaian yang objektif didalam menentukan dan menetapkan pegawai di dalam jabatan.
- c. Disusun standar kompetensi jabatan pegawai setelah Undang-Undang ASN diberlakukan.
- d. Disusun standar hasil atau output kinerja dari suatu jabatan.

2.4 Penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karir

1. Pagu Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 314.234.880,00 terealisasi 238.404.500,00 atau capaian kinerjanya 75,87% didukung 4 (empat) indicator kinerja output yaitu :

1. Jumlah peraturan gubernur tentang standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan target 1 Pergub tercapai 1 pergub.
2. Jumlah pelaksanaan pendampingan penyusunan standart kompetensi jabatan eselon II dengan target 1 kali pelaksanaan tercapai 1 kali pelaksanaan.

3. Prosentase SKPD dan UPT yang telah menyusun standart kompetensi dengan target 75% tercapai 75%.
4. Prosentase SKPD dan UPT yang telah menyusun pola karier dengan target 75% tercapai 60%.

2. Permasalahan

- a. Belum adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karier pegawai.
- b. Belum adanya standar kompetensi, terutama untuk jabatan setara eselon II.

3. Solusi

- a. Perlu adanya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (setingkat perda) tentang penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karier pegawai dan selanjutnya sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
- b. Perlu adanya standar kompetensi, terutama untuk jabatan setara eselon II setelah diberlakukannya UU ASN.

2.5 Peningkatan kesejahteraan aparatur, penilaian dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan

1. Pagu Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 1.617.013.000,00 terealisasi Rp. 1.578.480.988,00 atau capaian kinerja keuangannya adalah 97,62%, dengan didukung 7 (tujuh) indikator kinerja output yaitu :

1. Jumlah dokumen pelaksanaan sosialiasi BPJS, Taspen, Bapertarum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan target 3 Dokumen tercapai 3 dokumen.
2. Jumlah bimtek penganugerahan Satyalencana karya bagi pegawai ASN melalui Web dengan target 1 kali pelaksanaan tercapai 1 kali pelaksanaan.
3. Prosentase capaian rata-rata komulatif atas SKP dan perilaku kerja dari pegawai ASN dengan target 75% tercapai 85%.
4. Jumlah rancangan pergub tentang pemberian penghargaan bagi PNS dengan target 1 Pergub tidak tercapai.
5. Prosentase pegawai ASN yang menyusun SKP dengan benar dengan target 100% tercapai 99,94%

6. Jumlah PNS yang akan purna tugas mendapatkan pembekalan kewirausahaan dengan target 100 PNS yang akan purna tugas tercapai 100 PNS yang akan purna tugas.
7. Jumlah dokumen pelaksanaan rapat kerja evaluasi SKP dengan target 1 Dokumen tercapai 1 dokumen.

Tabel 2.2

Data Pegawai Yang Akan Pensiun Pada Tahun 2016-2019.

Tahun	Eselon				Staf	Jumlah
	I	II	II	IV		
2016	-	10	82	115	926	1.133
2017	-	15	78	119	982	1.194
2018	1	14	67	117	1.037	1.236
2019	-	12	61	110	876	1.059
Jumlah	1	51	288	461	3.821	4.622

Sumber: SIMPEG BKD Provinsi Jawa Timur

2. Permasalahan

- a. Kurangnya motivasi PNS yang akan purna tugas untuk diberi pelatihan dan pembekalan kewirausahaan.
- b. Belum ada standar kesejahteraan yang sesuai prestasi/kinerja masing-masing PNS
- c. Belum adanya standar hasil kinerja sesuai jabatan,
- d. Belum adanya kebijakan atau aturan dalam hal pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi.

3. Solusi

- a. Memberikan motivasi bagi PNS yang akan purna tugas untuk diberi pelatihan dan pembekalan kewirausahaan, setelah benar-benar PNS itu pensiun atau memberikan harapan hidup lebih lama, baik berupa permodalan usaha, maupun jaringan kerja .
- b. Menyusun standar prestasi/kinerja masing-masing PNS untuk dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- c. Menyusun standar hasil kinerja sesuai jabatan bagi pegawai dan dikaitkan dengan pemberian tunjangan-tunjangan atau penghargaan lainnya.
- d. Disusun pedoman atau aturan tentang kebijakan pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi berupa beasiswa, umroh, naik haji, dan penghargaan lainnya.

3. Program Pengembangan data informasi

Program pengembangan data informasi, dengan indikator kinerja prosentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, capaian kerjanya adalah 156%, artinya didalam proses meningkatkan kualitas database kepegawaian, mulai dari entri data kepegawaian yang terbaru, mensinkronkan database dengan sistem database yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, sampai dengan pengamanan database kepegawaian semua rencana telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi ketika terkait dengan kegiatan kepangkatan *on line system*, pensiun *on line system*, pengiriman kediklatan/tugas belajar, e-SKP, maupun penerapan aplikasi kepegawaian lainnya tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga ketika stakeholder, dan atau pemangku kepentingan mencari database kepegawaian yang akurat masih jauh dari harapan. Oleh karena itu kedepan BKD Provinsi Jawa Timur didalam pengembangan database kepegawaian tidak sebagian saja atau berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi harus terintegrasi dengan kegiatan lainya bahkan harus sinkron dan bekerjasama dengan database pemerintah pusat, sehingga informasi kepegawaian dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan sebagai bahan untuk pengambil keputusan.

Program ini didukung 1 (satu) kegiatan yaitu:

2.6 Penguatan system informasi dan pengelolaan database pegawai

1. Pagu Anggaran

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 2.335.536.000,00 terealisasi Rp. 2.226.129.951,00 atau capaian kinerja keuangan 95,32%, dengan didukung 3 (tiga) indikator kinerja output yaitu :

1. Jumlah dokumen informasi dan data kepegawaian yang akurat, lengkap dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen.
2. Jumlah Aplikasi e-presensi on-line dengan target 1 aplikasi tercapai 1 aplikasi.
3. Prosentase tingkat keakurasi database kepegawaian dan perkembangan kinerja pegawai dengan target 50% tercapai 78%.
4. Prosentase tingkat akurasi file tatanaskah pegawai perorangan dengan target 50% tercapai 78%.
5. Jumlah file penataan tatanaskah kepegawaian dengan target 20.000 file pegawai tercapai 19.567 file pegawai.

2. Permasalahan

- a. Database kepegawaian belum diberdayakan sebagai bahan analisis, informasi maupun proses dalam pembuatan keputusan manajemen pegawai negeri sipil atau ASN.

- b. Pengolahan data belum seluruhnya terintegrasi secara online dengan SKPD dan Kabupaten/Kota, maupun pemerintah pusat.
 - c. Kurangnya pegawai/petugas pengelola data yang profesional dalam menangani IT.
 - d. Kurangnya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal menyamakan persepsi, sistem informasi, baik itu sistem terkait IT maupun format-format yang dibutuhkan.
3. Solusi
- a. Memperdayakan dan memanfaatkan database kepegawaian belum sebagai bahan analisis penentuan mutasi jabatan, pendistribusian pegawai, maupun informasi-informasi lainnya didalam proses penentuan dan penetapan keputusan manajemen pegawai negeri sipil atau ASN.
 - b. Pengolahan data kepegawaian, seharusnya sinkron dan terintegrasi dengan database pemerintah pusat, baik itu sistem datanya maupun proses cara pembentukan database.
 - c. BKD yang mempunyai kewenangan dalam menentukan penempatan pegawai, seharusnya memiliki pegawai/petugas pengelola database kepegawaian yang profesional dalam menangani IT, bahkan pranata komputer, programer, harus ditempatkan di BKD untuk mendukung kinerja BKD dalam mempersiapkan pelayanan yang serba elektronik (*on line sistem*)
 - d. Bekerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam hal menyamakan persepsi, sistem informasi, baik itu sistem terkait IT maupun format-format yang dibutuhkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada masa yang akan datang, maka isu-isu strategis bidang kepegawaian diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagai perumus kebijakan dan manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil.
- b. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil.
- c. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil antar bidang dan lintas sektor
- d. Peningkatan *capacity building* kelembagaan manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil

- e. Peningkatan kualitas manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil
- f. Pengembangan sistem informasi manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil yang transparan, akuntabel dan aksesibel

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Provinsi Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
120.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM Aparatur terhadap pelayanan adm. Perkantoran, dan kenyamanan kantor (IKM Pelayanan Internal)	100%	778.965.613	120.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		IKM Aparatur terhadap pelayanan adm. Perkantoran, dan kenyamanan kantor (IKM Pelayanan Internal)	100%	778.965.613
120.01.019	a. Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BKD	a. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP b. Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	a. 100% b. 100%	778.965.613	120.01.019	a. Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BKD	a. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP b. Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	778.965.613	778.965.613
120.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	3.241.710.125	120.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	3.241.710.125
120.02.012	a. Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	BKD	a. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor b. Jumlah penerbitan buletin	a. 100% b. 4 kali	1.555.626.750	120.02.012	a. Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	BKD	a. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor b. Jumlah penerbitan buletin	1.555.626.750	1.011.406.500
120.02.031	b. Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	BKD	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	1.686.083.375	120.02.031	b. Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	BKD	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	1.686.083.375	2.116.568.000

120.08	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan			Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu dan benar sesuai dengan renstra.	100%	940.000.000	120.08	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan			Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu dan benar sesuai dengan renstra.	100%	940.000.000
120.08.001	a	Penyusunan dokumen perencanaan	BKD	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu (RKA,DPA,Renstra,PK)	4 dokumen	285.000.000	120.08.001	a.	Penyusunan dokumen perencanaan	BKD	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu (RKA,DPA,Renstra,PK)	4 dokumen	285.000.000
120.08.002	b	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	BKD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan (LKjIP, LPPD,LKPJ dan Evaluasi Laporan)	4 dokumen	656.000.000	120.08.002	b.	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	BKD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan (LKjIP, LPPD,LKPJ dan Evaluasi Laporan)	4 dokumen	656.000.000
120.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			Porsentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	1.345.000.000	120.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			Porsentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	2.051.940.000
120.07.002	a	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pemprov Jatim	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	765.000.000	120.07.002	a.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pemprov Jatim	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	765.000.000
120.07.001	b	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Pemprov Jatim	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	100%	580.000.000	120.07.001	b.	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Pemprov Jatim	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	100%	580.000.000
120.41	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif,transparan dan akuntabel	100%	8.140.000.000	120.41	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif,transparan dan akuntabel	100%	1.403.502.900

120.41.019	a	Kegiatan meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kompetensi manajerial aparatur 2. Analisis kebutuhan pengembangan SDA 3. Analisis kebutuhan aparatur yang menduduki JFT 4. Development center bagi Eselon III 5. Pembekalan jiwa entrepreneurship bagi PNS 6. Grand design manaemen ASN di lingkungan Pemprov.Jatim 7. Pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur 8. Sertifikasi aparatur dibidang TIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80 org 2. 49 SKPD 3. 49 SKPD 4. 25 org 5. 2 angk 6. 1 dok 7. 10 org 8. 20 org 	3.850.000.000	120.41.019	a.	Kegiatan meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kompetensi manajerial aparatur 2. Analisis kebutuhan pengembangan SDA 3. Analisis kebutuhan aparatur yang menduduki JFT 4. Development center bagi Eselon III 5. Pembekalan jiwa entrepreneurship bagi PNS 6. Grand design manaemen ASN di lingkungan Pemprov.Jatim 7. Pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur 8. Sertifikasi aparatur dibidang TIK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80 org 2. 49 SKPD 3. 49 SKPD 4. 25 org 5. 2 angk 6. 1 dok 7. 10 org 8. 20 org 	3.850.000.000
120.41.084	b	Perencanaan kepegawaian dan formasi	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana 2. Workshop penyusunan beezeting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi 3. Analisis kebutuhan aparatur jabatan fungsional umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 49 SKPD 2. 87 SKPD dan Kab./Kota 3. 1 dok 	825.000.000	120.41.084	b.	Perencanaan kepegawaian dan formasi	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana 2. Workshop penyusunan beezeting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi 3. Analisis kebutuhan aparatur jabatan fungsional umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 49 SKPD 2. 87 SKPD dan Kab./Kota 3. 1 dok 	825.000.000
120.41.089	c	Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggandaan peraturan kepegawaian 2. Penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai 3. Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai 4. Verifikasi LP2P 5. Bintek LP2P 6. Konsultasi pelanggaran kepegawaian 7. Sidak Disiplin Pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 dok 2. 1 dok 3. 1 lap 4. 1 dok 5. 1 lap 6. 1 dok 7. 1 dok 	2.365.000.000	120.41.089	c.	Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggandaan peraturan kepegawaian 2. Penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai 3. Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai 4. Verifikasi LP2P 5. Bintek LP2P 6. Konsultasi pelanggaran kepegawaian 7. Sidak Disiplin Pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 dok 2. 1 dok 3. 1 lap 4. 1 dok 5. 1 lap 6. 1 dok 7. 1 dok 	2.365.000.000

			8. Aplikasi E- Presensi	8. 1 aplikasi					8. Aplikasi E- Presensi	8. 1 aplikasi	
120.97	Program Pengembangan Data Informasi		Prosentase database kepegawaian yang berkualitas (akurat, lengkap, up date, akuntabel)	100%	2.078.652.238	120.97	Program Pengembangan Data Informasi		Prosentase database kepegawaian yang berkualitas (akurat, lengkap, up date, akuntabel)	100%	2.078.652.238
120.97.007	a Kegiatan penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	BKD	1. Tersedianya aplikasi sistem informasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan 2. Tersedianya file tata naskah pegawai yang akurat	1. 1 aplikasi 2. 100%	2.078.652.238	120.97.007	a. Kegiatan penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	BKD	1. Tersedianya aplikasi sistem informasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan 2. Tersedianya file tata naskah pegawai yang akurat	1. 1 aplikasi 2. 100%	2.078.652.238
120.94	Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur		Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan	100%	9.044.350.746	120.94	Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur		Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan	100%	9.044.350.746
120.94.001	a Kegiatan seleksi rekrutmen pegawai yang transparan dan bebas KKN melalui sistem CAT	Pemprov Jatim	1. Penyusunan naskah soal TKB 2. Pelaksanaan ujian ASN pelamar umum sistem CAT 3. Pelaksanaan ujian TKD penerimaan calon praja IPDN 4. Seleksi administrasi pendaftaran dan pengolahan data pelamar 5. Seleksi penerimaan calon praja IPDN	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100%	4.220.000.000	120.94.001	a. Kegiatan seleksi rekrutmen pegawai yang transparan dan bebas KKN melalui sistem CAT	Pemprov Jatim	1. Penyusunan naskah soal TKB 2. Pelaksanaan ujian ASN pelamar umum sistem CAT 3. Pelaksanaan ujian TKD penerimaan calon praja IPDN 4. Seleksi administrasi pendaftaran dan pengolahan data pelamar 5. Seleksi penerimaan calon praja IPDN	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100%	4.220.000.000

120.94.002	b	Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Pemprov Jatim	1. Persentase pelaksanaan pelantikan dan sertijab 2. Persentase penyelesaian pensiun pegawai ASN 3. Persentase penyelesaian proses kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur 4. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 5. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100%	1.370.000.000	120.94.002	b. Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Pemprov Jatim	1. Persentase pelaksanaan pelantikan dan sertijab 2. Persentase penyelesaian pensiun pegawai ASN 3. Persentase penyelesaian proses kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur 4. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 5. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100%	1.370.000.000
120.94.004	c	Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Pemprov Jatim	Persentase penempatan pejabat structural sesuai kompetensi dan kebutuhan	100%	1.050.000.000	120.94.004	c. Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Pemprov Jatim	Persentase penempatan pejabat structural sesuai kompetensi dan kebutuhan	100%	1.050.000.000
120.94.005	d	Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir	Pemprov Jatim	1. Penyusunan Pergub ttg standar kompetensi jabatan 2. Pendampingan dan fasilitasi penyusunan standart kompetensi 3. Penyusunan standar kompetensi pimpinan tinggi pratama di lingkungan SKPD Pemprov Jatim 4. Penyusunan Pergub ttg pola karir	1. 1 dok 2. 1 dok 3. 1 dok 4. 1 dok	440.000.000	120.94.005	d. Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir	Pemprov Jatim	1. Penyusunan Pergub ttg standar kompetensi jabatan 2. Pendampingan dan fasilitasi penyusunan standart kompetensi 3. Penyusunan standar kompetensi pimpinan tinggi pratama di lingkungan SKPD Pemprov Jatim 4. Penyusunan Pergub ttg pola karir	1. 1 dok 2. 1 dok 3. 1 dok 4. 1 dok	440.000.000

120.94.006	e	Peningkatan kesejahteraan aparatur, penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek penyusunan SKP 2. Bimtek pengusulan satyalencana karya satya berbasis WEB 3. Pembekalan Kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas 4. Pengusulan satyalencana karya satya bagi ASN 5. Evalausi penilaian kinerja 6. Aplikasi e-SKP 7. Penganugrahan satyalencana karya satya bagi ASN Jawa Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 kali 2. 1 lap 3. 1 lap 4. 1 dok 5. 1 dok 6. 1 aplikasi 7. 1 lap 	1.064.350.746	120.94.006	e.	Peningkatan kesejahteraan aparatur, penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek penyusunan SKP 2. Bimtek pengusulan satyalencana karya satya berbasis WEB 3. Pembekalan Kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas 4. Pengusulan satyalencana karya satya bagi ASN 5. Evalausi penilaian kinerja 6. Aplikasi e-SKP 7. Penganugrahan satyalencana karya satya bagi ASN Jawa Timur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 kali 2. 1 lap 3. 1 lap 4. 1 dok 5. 1 dok 6. 1 aplikasi 7. 1 lap 	1.064.350.746
Total Belanja Langsung						25.568.678.722	Total Belanja Langsung						25.568.678.722

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan terkait dengan agenda Gubernur Jawa Timur, salah satunya yaitu percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ada 4 (empat) isu strategis yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian dengan sasaran peningkatan kualitas tenaga pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas mekanisme/prosedur/SOP pelayanan ditetapkan kebijakan:
 - a. Mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat (IKM);
 - b. Mengembangkan sistem informasi layanan kepegawaian;
 - c. Meningkatkan standar mutu layanan kepegawaian dengan memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana, tidak rumit, dan mudah dimengerti;
 - d. Mengembangkan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik;
 - e. Pembagunan fasilitas pelayanan dalam rangka pengembangan jenis layanan;
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (Hardware dan Software) sebagai pendukung utama kelembagaan.
2. Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau PNS yang profesional dengan sasaran terwujudnya PNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, disiplin, dan perilaku kerja produktif yang amanah, serta berdedikasi tinggi ditetapkan kebijakan:
 - a. Mengembangkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis kompetensi;
 - b. Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja, etos kerja PNS dan kedisiplinan PNS;
 - c. Menegakkan aturan kepegawaian dan disiplin PNS;
3. Upaya meningkatkan kualitas penataan SDM Aparatur yang ideal atau *Right Sizing* sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya, ditetapkan kebijakan:

- a. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan jabatan/keahlian sehingga setiap pegawai mempunyai jabatan yang jelas, dan agar tidak terjadi inefisiensi dalam penggunaan Sumber Daya.
 - b. Pendistribusian pegawai sesuai dengan ketrampilan dan kompetensinya serta kebutuhan organisasi;
 - c. Pemetaan dan bezzeting SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi secara rutin dan berkala dalam rangka menciptakan komposisi SDM Aparatur yang ideal berdasarkan Analisis jabatan dan Beban Kerja (ABK).
 - d. Menegakkan nilai-nilai netralitas, kedisiplinan PNS dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
4. Upaya meningkatkan kesejahteraan SDM Aparatur dengan sasaran terwujudnya peningkatan remunerasi sesuai dengan kebutuhan hidup dan pemberian reward berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja ditetapkan kebijakan:
- a. Meningkatkan pemberian penghargaan, reward, dan kompensasi berbasis kinerja dan menyusun pedoman pemberian reward (selain kenaikan pangkat);
 - b. Pembekalan bagi SDM Aparatur yang akan purna tugas;
 - c. Pemberian tambahan penghasilan bagi SDM Aparatur yang akan purna tugas.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Maka visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya aparatur daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Dengan semangat itu, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :

**“Mewujudkan Aparatur Birokrasi Jawa Timur Lebih Bersih,
Profesional dan Sejahtera”**

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menyelaraskan gerak dan langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Adapun misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 adalah sebagai berikut :

**”Memberikan Kontribusi Optimal terwujudnya SDM Aparatur Lebih bersih,
Profesional dan Sejahtera melalui Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur
Berkualitas”**

Misi ini dimaksudkan agar BKD Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, mulai dari perencanaan pegawai yang berbasis kebutuhan riil instansi, penataan pegawai berprinsip *The Right Man In The Right Place* dan sesuai kebutuhan (*Right Sizing*), pendistribusian pegawai sampai dengan pengevaluasian kinerja pegawai, serta berkomitmen memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka untuk mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

a. Mewujudkan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dan kebutuhan.

b. Mewujudkan sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi

Terwujudnya sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi dengan penilaian kinerja termasuk peta jabatan dan integrasi sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai dengan pengisian dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan sasaran kerja pegawai.

c. Mewujudkan pegawai ASN yang disiplin, integritas dan berkinerja tinggi

Terbentuknya pegawai ASN yang disiplin, integritas dan berkinerja tinggi (termasuk penghargaan dan sanksi administratif) berdasarkan hasil pendataan calon penerima penghargaan SATYA LANCANAKARYA SATYA (X,XX,XXX Tahun) secara online dan penyelesaian kasus kepegawaian.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dan eksternal dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis BKD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas penataan SDM Aparatur.

Dengan mempertimbangkan misi Gubernur Jawa Timur, terutama untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ditetapkan indikator-indikator keberhasilan sasaran strategis ini mencakup Persentase penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam rangka dilaksanakan melalui penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sehingga didalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, oleh karena itu pada sasaran didukung indikator-indikator keberhasilan yang mencakup, Prosentase ASN yang didistribusikan dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur memenuhi kekurangan pegawai yang berdasarkan pada hasil pemetaan, Persentase ASN yang dialihfungsikan dari jabatan fungsional umum atau administrasi ke jabatan fungsional tertentu dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak pegawai dengan jabatan fungsional umum atau administrasi yang berlebihan di seluruh SKPD (hasil pemetaan) dialihfungsikan menjadi jabatan fungsional tertentu untuk memenuhi kekurangan jabatan fungsional tertentu dan rekrutmen CPNS dengan sistem CAT.

b. Meningkatkan kualitas data pegawai ASN yang Akurat.

Pelaksanaan akurasi database ini berbasis e – PUPNS untuk Tahun 2016 hanya PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedangkan akurasi database guru SMA/SMK pelaksanaanya pada Tahun 2017.

c. Meningkatkan disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN

Pelaksanaan pelayanan secara online dalam pemberian penghargaan SATYA LANCA KARYA SATYA dimaksudkan untuk lebih meningkatkan motivasi pegawai ASN yang bertujuan tercapainya SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera dengan indikator perilaku kerja dari tingkat kehadiran pegawai ASN, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak

pelanggaran yang dilakukan oleh ASN karena kriteria ASN yang berkualitas salah satunya disiplin, taat hukum, dan tidak melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran peraturan kepegawaian dan kode etik dan perilaku pegawai dan juga pelanggaran terkait masalah pidana yang dilakukan oleh ASN, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh ASN dan meningkatnya kedisiplinan pegawai ASN melalui penggunaan presensi elektronik yang terhubung dengan sistem database kepegawaian ASN

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program-program tersebut berjumlah 7 Program dengan 17 kegiatan serta total anggaran Rp. **25.568.678.722** yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2016				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
120.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM Aparatur terhadap pelayanan adm. Perkantoran, dan kenyamanan kantor (IKM Pelayanan Internal)		100%	778.965.613	APBD	Program Pendukung Operasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian
120.01.019	a. Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	a. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP b. Persentase fasilitas penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	BKD	a. 100% b. 100%	778.965.613	APBD	
120.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		100%	3.241.710.125	APBD	Program Pendukung Operasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian
120.02.012	a Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	a. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor b. Jumlah penerbitan buletin	BKD	a. 100% b. 4 kali	1.555.626.750	APBD	
120.02.031	b Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	BKD	100%	1.686.083.375	APBD	
120.08	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu dan benar sesuai dengan renstra.		100%	940.000.000	APBD	Program Pendukung Operasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian
120.08.001	a Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu (RKA,DPA, Renstra, PK)	BKD	4 dokumen	285.000.000	APBD	
120.08.002	b Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan (LKjIP, LPPD, LKPJ dan Evaluasi Laporan)	BKD	4 dokumen	656.000.000	APBD	

120.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Porsentase kelembagaan yang tepat fungsi		100%	1.345.000.000	APBD	Program Pendukung Operasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian
120.07.002	a Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Persentase pelayanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Pemprov Jatim	100%	765.000.000	APBD	
120.07.001	b Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	Pemprov Jatim	100%	580.000.000	APBD	
120.41	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif,transparan dan akuntabel		100%	8.140.000.000	APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 "Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemikiran Dasar Nawa Cita " Melakukan Revolusi Karakter Bangsa (Revolusi Mental) "
120.41.019	a Kegiatan meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab	1. Analisis kompetensi manajerial aparatur 2. Analisis kebutuhan pengembangan SDA 3. Analisis kebutuhan aparatur yang menduduki JFT 4. Development center bagi Eselon III 5. Pembekalan jiwa entrepreneurship bagi PNS 6. Grand design manaemen ASN di lingkungan Pemprov.Jatim 7. Pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur 8. Sertifikasi aparatur dibidang TIK	Pemprov Jatim	1. 80 org 2. 49 SKPD 3. 49 SKPD 4. 25 org 5. 2 angk 6. 1 dok 7. 10 org 8. 20 org	3.850.000.000	APBD	
120.41.084	b Perencanaan kepegawaian dan formasi	1. Sosialisasi Pergub tentang jabatan fungsional pelaksana 2. Workshop penyusunan beezeting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi 3. Analisis kebutuhan aparatur jabatan fungsional umum	Pemprov Jatim	1. 49 SKPD 2. 87 SKPD dan Kab./Kota 3. 1 dok	825.000.000	APBD	
120.41.089	d Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	1. Penggandaan peraturan kepegawaian 2. Penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawinan pegawai 3. Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai 4. Verifikasi LP2P 5. Bintek LP2P 6. Konsultasi pelanggaran kepegawaian 7. Sidak Disiplin Pegawai 8. Aplikasi E- Presensi	Pemprov Jatim	1. 1 dok 2. 1 dok 3. 1 lap 4. 1 dok 5. 1 lap 6. 1 dok 7. 1 dok 8. 1 aplikasi	2.365.000.000	APBD	

120.97	Program Pengembangan Data Informasi	Prosentase database kepegawaian yang berkualitas (akurat, lengkap, up date, akuntabel)		100%	2.078.652.238	APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 "Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik"
120.97.007	a Kegiatan penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	1. Tersedianya aplikasi sistem informasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan 2. Tersedianya file tata naskah pegawai yang akurat	BKD	1. 1 aplikasi 2. 100%	2.078.652.238	APBD	Implementasi UU no.23/2014 ttg Pemerintah Daerah yang mengamankan pelimpahan wewenang pendidikan menengah kepada Pemprov, sehingga perlu update data pegawai terutama data PNS Guru SMA/SMK
120.94	Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur	Porsentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan		100%	9.044.350.746	APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 "Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik" dan Pemikiran Dasar Nawa Cita "
120.94.001	a Kegiatan seleksi rekrutmen pegawai yang transparan dan bebas KKN melalui sistem CAT	1. Penyusunan naskah soal TKB 2. Pelaksanaan ujian ASN pelamar umum sistem CAT 3. Pelaksanaan ujian TKD penerimaan calon praja IPDN 4. Seleksi administrasi pendaftaran dan pengolahan data pelamar 5. Seleksi penerimaan calon praja IPDN	Pemprov Jatim	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100%	4.260.000.000	APBD	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa (Revolusi Mental) "

120.94.002	b	Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelaksanaan pelantikan dan sertijab 2. Persentase penyelesaian pensiun pegawai ASN 3. Persentase penyelesaian proses kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur 4. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 5. Persentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 	1.370.000.000	APBD	Terkait dengan isu strategis RPJMD Prov Jawa Timur 2014-2019 tentang reformasi birokrasi penataan pegawai
120.94.004	c	Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	Persentase penempatan pejabat structural sesuai kompetensi dan kebutuhan	Pemprov Jatim	100%	1.050.000.000	APBD	
120.94.005	d	Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pergub ttg standar kompetensi jabatan 2. Pendampingan dan fasilitasi penyusunan standart kompetensi 3. Penyusunan standar kompetensi pimpinan tinggi pratama di lingkungan SKPD Pemprov Jatim 4. Penyusunan Pergub ttg pola karir 	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 dok 2. 1 dok 3. 1 dok 4. 1 dok 	440.000.000f	APBD	
120.94.006	e	Peningkatan kesejahteraan aparatur ,penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek penyusunan SKP 2. Bimtek pengusulan satyalencana karya satya berbasis WEB 3. Pembekalan Kewirausahaan bagi ASN menjelang purna tugas 4. Pengusulan satyalencana karya satya bagi ASN 5. Evalausi penilaian kinerja 6. Aplikasi e-SKP 7. Penganugrahan satyalencana karya satya bagi ASN Jawa Timur 	Pemprov Jatim	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 kali 2. 1 lap 3. 1 lap 4. 1 dok 5. 1 dok 6. 1 aplikasi 7. 1 lap 	1.084.350.746	APBD	
Total Belanja Langsung						25.568.678.722		

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2016. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2014–2019.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, November 2015

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19580227 198503 1 007